



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI I DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2009 - 2010
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 2 – 5 AGUSTUS 2010**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2010**

BAB I PENDAHULUAN

I. UMUM

Setiap Reses Masa Persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 – 2010, Komisi I DPR RI telah membentuk 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja, yaitu Kunjungan Kerja ke Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam laporan ini akan disampaikan mengenai Laporan Tim Kunjungan Kerja Ke Propinsi Sumatera Utara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Propinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI khususnya permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, serta komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam masa persidangan berikutnya.

III. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2010, dengan komposisi keanggotaan Tim yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang Anggota Komisi I DPR RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Staf Ahli Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI, 1 (satu) orang Penghubung Kemhan dan 1 (satu) orang Penghubung Kemkominfo, 1 (satu) orang penghubung BIN, dan 1 (satu) orang penghubung PT.Pos Indonesia

Adapun daftar nama tim kunker Komisi I DPR RI ke Propinsi Sumatera Utara secara lengkap adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. ANGG.	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Hayono Isman, S.IP	450	F-PD	Ketua Tim
2.	Max Sopacua, S.E., M.Si.	474	F-PD	Anggota Tim
3.	Drs. H. Guntur Sasono, M.Si	523	F-PD	Anggota Tim
4.	Mirwan Amir	416	F-PD	Anggota Tim
5.	Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si	515	F-PD	Anggota Tim
6.	Dr. H. R. Adjeng Ratna Suminar, SH. MH	466	F-PD	Anggota Tim
7.	Yorrys Raweyai	277	F-PG	Anggota Tim
8.	Drs. Enggartiasto Lukita	216	F-PG	Anggota Tim
9.	Tantowi Yahya	192	F-PG	Anggota Tim
10.	Jeffrie Geovanie	182	F-PG	Anggota Tim
11.	Ir. Neil Iskandar Daulay	179	F-PG	Anggota Tim
12.	Ahmad Zaki Iskandar Z, B.Bus	205	F-PG	Anggota Tim
13.	Drs. H.A. Muchammad Ruslan	211	F-PG	Anggota Tim
14.	H. Tri Tamtomo, SH	322	F-PDIP	Anggota Tim
15.	Evita Nursanty, M.Sc	357	F-PDIP	Anggota Tim
16.	Luthfi Hasan Ishaq, MA	87	F-PKS	Anggota Tim
17.	Mahfudz Sidik	18	F-PKS	Anggota Tim
18.	M. Sahfan Badri Sampurno	55	F-PKS	Anggota Tim
19.	Ir. H. Azwar Abubakar, MM	101	F-PAN	Anggota Tim
20.	Prof. Dr. Ismed Ahmad	137	F-PAN	Anggota Tim
21.	Amin Suparmin	293	F-PPP	Anggota Tim
22.	H. Ahmad Muzani	21	F-GERINDRA	Anggota Tim
23.	Rachel Maryam Sayidina	26	F- GERINDRA	Anggota Tim
24.	Dra. Hj. Soemientarsih Muntoro, M.Si	11	F-HANURA	Anggota Tim
25.	Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, M.Si.	-		Sekretariat Komisi I DPR RI
26.	Jaka Adiwiguna, S.Sos	-		Sekretariat Komisi I DPR RI
27.	Agung Sulistiono, SH	-		Pemberitaan DPR RI
28.	Tubagus Erif Faturrahman	-		Staf Ahli Komisi I DPR RI
29.	Ernalem Bangun	-		Penghubung Dephan
30.	Boedi Hartono, SH	-		Penghubung BIN
31.	Endang Kartiwa	-		Penghubung Depkominfo
32.	Mugiono	-		Penghubung Pos Indonesia

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN

I. PROFIL PROPINSI SUMATERA UTARA

Gambaran umum mengenai Propinsi Sumatera Utara disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta pimpinan pemerintahan daerah lainnya. Sumatera Utara merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Medan dengan luas 71.680,68 km², memiliki 33 kabupaten dan kota, 417 kecamatan dan 5.747 desa kelurahan serta dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 13.042.317 jiwa yang terdiri dari beragam suku bangsa yang tergolong dari Melayu Tua dan Melayu Muda. Penduduk asli propinsi ini terdiri dari Suku Melayu, Suku Batak, Suku Nias, dan Suku Aceh. Daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat pada umumnya didiami oleh Suku Melayu dan Suku Mandailing yang hampir seluruhnya beragama Islam. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Selain itu juga ada Suku Nias di kepulauan sebelah barat. Kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh Suku Jawa. Suku lainnya adalah Suku Tionghoa, Minang, Ambon, Sunda dan beberapa minoritas lain. Mayoritas penduduk Sumatera Utara memeluk agama Islam (65,45 %). Lainnya adalah Protestan (26,62 %), Katholik (4,78 %), Budha (2,82 %), Hindu (0,19 %), lainnya (0,14 %)

Propinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang kaya dari sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati, seperti pertanian (padi, kacang, ubi, jeruk, sayuran, dsb), perkebunan (sawit, karet, kopi, coklat, nilam, tembakau, kemenyan), industri (makanan, minuman, ekstil, kimia, karet, plastik), galian/tambang (minyak bumi, timah, belerang, bt bara, emas, pasir warsa, aluminium), laut (ikan, udang) dan hutan (kayu, rotan).

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dan grafik positif. Berdasarkan data triwulan satu tahun 2010 telah mencapai 6,04 persen lebih tinggi dari pencapaian nasional yang mencapai 5,07 persen, diharapkan pada tahun 2010 ini pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tetap berada diatas angka 6 persen. Neraca perdagangan luar negeri, sampai dengan April tahun 2010, surplus sebesar 1,44 milyar US dollar dengan volume ekspor sebesar 2,21 juta ton dengan nilai 2,49 milyar US dollar, sementara dari sisi impor volumenya mencapai 1,78 juta ton dengan nilai sebesar 1,55 milyar US dollar. Secara khusus, pada April tahun 2010, nilai ekspor Sumatera Utara mencapai 755,01 juta US dollar, meningkat sebesar 20,31 persen dibandingkan pada bulan sebelumnya, hal ini merupakan salah satu indikator terjadinya perbaikan kondisi ekonomi dunia yang secara langsung berdampak pada peningkatan volume dan nilai ekspor Sumatera Utara. Tingkat inflasi Sumatera Utara menunjukkan angka yang relatif aman, dimana sampai dengan Mei 2010 secara kumulatif mencapai 1,33%, sehingga diharapkan pada tahun 2010 angka inflasi Sumatera Utara diharapkan berada dibawah target RKPD yakni 6,50%.

Arah pergerakan dan pembangunan Propinsi Sumatera Utara disesuaikan dalam rangka mendukung tujuan dan cita-cita pembangunan nasional. Salah satunya adalah mendukung program Millenium Development Goals (MDGs) yang dimuat dalam "Deklarasi Millenium" dimana Indonesia merupakan salah satu negara

penandatanganan deklarasi tersebut. MDGs memiliki delapan tujuan atau target dimana penekanan yang paling utama diarahkan pada penanggulangan kemiskinan. Hal ini tercermin dari dinamika sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara yang juga menunjukkan perbaikan seperti angka persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan, dimana April tahun 2009 mencapai 11,51 persen atau sekitar 1.499.700 jiwa dan pada tahun 2010 menurun menjadi 11,30% atau sekitar 1.490.900 orang. Tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari 8,45% pada Agustus 2009 menjadi 8,01% pada Maret tahun 2010.

Persoalan politik lokal di Sumatera Utara memiliki catatan bahwa pada tahun 2010 ini, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemilukada langsung di 22 kabupaten dan kota dimana 14 kabupaten dan kota telah melaksanakan pemilukada pada bulan Mei dan Juni tahun 2010 sementara sisanya 8 kabupaten dan kota lagi dijadwalkan bulan Agustus sampai dengan Desember 2010. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi akan dilakukan pemilihan ulang di dua daerah kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kota Tebing Tinggi.

Propinsi Sumatera Utara memiliki permasalahan terkait penanganan wilayah perbatasan khususnya yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, sebab Sumatera Utara memiliki 3 buah pulau yang langsung berbatasan dengan negara lain yaitu Pulau Berhala, Pulau Wunga dan Pulau Simuk. Permasalahan lainnya adalah wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera Utara. Wilayah Pantai Timur yang berbatasan dengan selat malaka potensi kerawanannya antara lain: perompakan di laut, perlintasan *trafikcing* maupun TKI ilegal, perlintasan perdagangan narkoba serta masuknya imigran gelap maupun pengungsi asing terutama dari negara Afganistan, Myanmar, Bangladesh sebagai lintasan pengungsi ke Australia. Sedangkan di wilayah pantai barat, dalam hal ini di pulau nias dan sibolga, belum terjangkau oleh sarana patroli laut yang memadai oleh unsur kama untuk mendeteksi kerawanan maupun pencurian kekayaan laut.

Terkait persoalan informasi dan telekomunikasi, Propinsi Sumatera Utara memiliki banyak persoalan. Wilayah Sumatera Utara cukup luas, khususnya wilayah pedesaan. Dari data BPS tahun 2009, jumlah desa di Sumatera Utara lebih kurang 6000 ribu desa dan hampir 50% wilayah pedesaan ini belum tersentuh oleh jaringan telekomunikasi. Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan pembangunan jaringan telepon pedesaan melalui kegiatan "*universal service obligation*" di 2.937 desa dan kelurahan. Demikian juga telah dibangun jaringan internet pedesaan di 313 ibukota kecamatan di wilayah kabupaten dan kota.

Melihat wilayah provinsi Sumatera Utara yang langsung berbatasan dengan negara tetangga dan topografinya yang dikelilingi pegunungan bukit barisan, keberadaan jaringan televisi seperti tiga belas menara TVRI di Sumatera Utara tidak berfungsi secara maksimal dan mengakibatkan adanya daerah *blank spot* di beberapa kabupaten dan kota. Bahkan ada pemancar TVRI yang sudah 30 tahun usianya belum ada pergantian dan kekuatan pemancar masih rendah. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa daerah kabupaten dan kota lebih mudah memperoleh informasi dari negara tetangga, khususnya di wilayah timur

Sumatera Utara. Dikhawatirkan akan berdampak pada memudarnya rasa nasionalisme masyarakat kepada NKRI.

Sesuai aturan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini melalui dinas komunikasi dan informatika provinsi Sumatera Utara, telah menyiapkan langkah-langkah pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah Sumatera Utara.

Dalam persoalan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Daerah Sumatera Utara didukung oleh satuan Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Polda Sumut. Secara spesifik, Polda Sumut didukung oleh 1 Polresta dan 25 Polres, Dit Pol Air, Satuan Brimob yang terdiri dari 3 Detasemen, 207 Polsek dan 172 pos polisi. Sasaran utama yang diprogramkan oleh Polda Sumut diantaranya adalah:

1. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkoba, perdagangan manusia dan terorisme.
2. Menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada jalur perdagangan dan distribusi serta jalur pelayaran internasional.
3. Tertangkapnya pelaku utama lainnya dalam kasus terorisme, jaringan utama pencucian uang, serta membaiknya praktek gakkum dalam mengelola sumber daya kehutanan dalam memberantas *illegal logging*, *overcating* dan *illegal trading*.
4. Terwujudnya validasi organisasi Polri yang makin ramping ditingkat polda, polres besar serta makin kuatnya pemberdayaan pelayanan ditingkat polsek.

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada tim kunker Komisi I DPR RI, Propinsi Sumatera Utara memiliki beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu:

1. Rendahnya kepedulian terhadap kebangsaan dan pertahanan negara di kalangan anak bangsa. Masalah kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara sebagai bagian kesadaran nasional dalam memperkuat NKRI perlu dikembangkan. Karena itu, perlu diberikan pendidikan atau pelatihan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, ekonomi pertahanan serta pengembangan manajemen bencana bagi masyarakat sipil termasuk pimpinan di daerah, sehingga kesadaran kolektif untuk memiliki bangsa ini semakin menguat.
2. Masyarakat Sumatera Utara berharap agar mendapatkan bagi hasil dari hasil perkebunan. Sebab dari sub sektor perkebunan, Sumatera Utara belum memperoleh hasil dari produksi yang dihasilkan perkebunan di daerah ini. Sebagai ilustrasi, dari jumlah pajak ekspor yang dikutip pemerintah sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang menurut Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah berjumlah 11,53 triliun rupiah, sementara yang diperoleh hanya dari pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
3. Terkait dengan keberadaan PT. Inalum di Sumatera Utara dimana DPR RI telah mendukung agar seluruh kepemilikan saham di perusahaan tersebut dapat diambil alih oleh Pemerintah RI dari konsorsium perusahaan Jepang, Provinsi Sumatera Utara berharap agar diberikan konstribusinya dalam bentuk kepemilikan saham tersebut.

4. Secara khusus Pemprop Sumut menyampaikan harapan dan dukungan dari Komisi I DPR RI terkait jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, terutama pada penerimaan dari pemberian hak penyelenggaraan frekuensi konsesi dan penerimaan dari pemberian izin hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Dari sektor kominfo ini, Sumatera Utara mampu memberikan pendapatan bagi negara yang sangat besar, namun dana yang dikembalikan sangat kecil.
5. Peningkatan alokasi anggaran dalam penanganan wilayah perbatasan yang memerlukan sarana dan prasarana kapal, pesawat helikopter beserta unsur personil maupun dana operasional dari pemerintah pusat, sehingga pimpinan daerah di wilayah ini mampu meng-cover dan mengendalikan situasi wilayah pantai timur maupun pantai barat.
6. Terkait dengan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, telah diamanatkan bahwa TV nasional menjadi TV berjaringan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, provinsi Sumatera Utara meminta agar konten daerah 30% menjadi konten informasi nasional yang saat ini masih belum maksimal terutama informasi pembangunan.

Beberapa permasalahan yang dapat menjadi hambatan bagi penegakkan kamtibmas di wilayah Sumut adalah:

1. Ideologi. Masih adanya upaya kelompok masyarakat tertentu yang mencoba merubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain serta adanya kelompok ekstrem/radikal yang menyusup dalam kehidupan masyarakat dan cenderung bertindak diluar hukum serta melakukan kegiatan teror.
2. Sosial Politik. Masih adanya perilaku oknum aparaturnegara yang KKN, adanya kelompok yang tidak puas atas kinerja pemerintah saat ini, isu pemekaran daerah yang didengungkan kelompok masyarakat/elit politik tertentu pasca pemilu 2009 (pembentukan Prop Taput) yang berpengaruh terhadap suhu politik, adanya indikasi kelompok tertentu yang cenderung inginkan perubahan total sistem politik dengan memanfaatkan gerakan reformasi
3. Sosial Ekonomi. Kendati secara statistic dan grafik angka pengangguran dan kemiskinan terus mengalami penurunan, ancaman PHK tetap menjadi isu sensitif yang mengakibatkan kesenjangan social. Selain itu, situasi perekonomian dunia berdampak pada tidak stabilnya harga komoditi unggulan Sumut (CPO, karet, coklat), terjadinya kelangkaan pupuk yang disebabkan kurangnya pasokan pupuk bersubsidi dan penyimpangan distribusi
4. Sosial Budaya. Terjadinya pergeseran nilai budaya sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan informasi, Masyarakat mudah terpancing oleh issue-issue yang tidak berdasar dan menyesatkan, banyak terjadi sengketa lahan antara PTPN dengan masyarakat. Namun demikian, dalam konteks perbedaan keyakinan, kehidupan antar umat beragama di Sumut relatif baik dan rukun.

II. KUNJUNGAN TERKAIT BIDANG TUGAS KOMISI I DPR RI

1. BIDANG PERTAHANAN

Terkait tugas Komisi I DPR RI di bidang pertahanan, tim kunker Komisi I DPR RI memfokuskan pada permasalahan alutsista yang dimiliki oleh satuan-satuan TNI di Propinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung konsep *minimum essential force* serta permasalahan kesejahteraan prajurit seperti *income* dan perumahan. Selain itu, tim Kunker Komisi I DPR RI juga mendalami dan memantau persoalan terkait penggusuran rumah dinas yang melahirkan konflik antara TNI dan purnawirawan atau veteran beserta keluarganya. Dalam bidang pertahanan ini, tim kunker Komisi I DPR RI melakukan kunjungan ke Kodam I/BB, Lantaman I Belawan, Kosek Hanudnas III Medan dan Lanud Medan, serta tinjauan langsung ke lapangan dalam melihat persiapan dan latihan Batalyon Marinir Hanlan I dan perumahan dinas TNI.

Berikut adalah hasil laporan dan temuan tim kunker Komisi I DPR RI di bidang pertahanan:

a. Kodam I / Bukit Barisan

Kodam I/Bukit Barisan merupakan Kodam Komando Kewilayahan Pertahanan dengan tugas melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan dengan pola OMP dan OMSP dengan tujuan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah daratan Kodam I/BB yang merupakan bagian dari NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan kodam I/BB dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Sebagai Kodam yang berbatasan langsung dengan banyak negara dan memiliki tanggungjawab terhadap puluhan pulau terluar, secara kondisi alutsista Kodam I/BB tidak seluruhnya beroperasi secara maksimal dan sebagian sudah berusia tua sehingga sangat berpengaruh terhadap akurasi dan presisi senjata saat digunakan. Berikut adalah beberapa laporan kondisi terkini Kodam I/BB:

- 1) Kodam I/BB memiliki wilayah perbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan India. Tugas dan tanggungjawab Kodam I/BB meliputi Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepri yang terdiri dari 70 kabupaten/kota, 705 kecamatan dan 9847 desa. Luas wilayah yang menjadi tanggungjawab Kodam I/BB adalah 992.154 KM² yang terdiri dari 77,86% lautan dan 22,14% daratan dengan jumlah pulau sebanyak 3.357 dimana 25 pulau diantaranya merupakan pulau terluar.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, kondisi kekuatan organisasi Kodam I/BB saat ini didukung oleh 6 satuan dengan rincian
 - a) Satuan Intel yang didukung oleh 1 Detasemen Intelijen, 5 Tim Intel Korem dan 31 unit Intel Kodim
 - b) Satuan Komando Wilayah yang terdiri dari 5 Korem, 31 Kodim dan 354 Koramil
 - c) Satuan Tempur yang didukung oleh 1 Brigadir Infantri dan 10 Batalyon Infantri

- d) Satuan Bantuan Tempur yang didukung oleh 5 Batalyon, 2 Detasemen dan 1 Kompi Kavaleri
 - e) Satuan Badan Pelaksana terdiri dari 15 Badan Pelaksana
 - f) Lembaga Pendidikan yang terdiri dari 1 Resimen Induk Kodam (Rindam)
- 3) Dengan luas wilayah dan tanggungjawab yang begitu besar, Kodam I/BB belum didukung secara maksimal baik dari segi materi alutsista maupun kualitas dan kuantitas personel. Jumlah nyata personel Kodam I/BB dari unsure militer adalah 87% dari TOP/DSPP sedangkan jumlah nyata PNS adalah 32,49% dari TOP/DSPP. Kekurangan jumlah personel tersebut secara substansi akan tertutupi apabila secara kualitas kemampuan personel sangat baik. Dengan segala keterbatasan yang ada, Kodam I/BB telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas personel yang ada dengan penggemblengan mental dan fisik.
- 4) Kondisi dan materi Alutsista yang dimiliki oleh Kodam I/BB tidak terpenuhi seluruhnya sesuai kebutuhan. Dari kondisi materi alutsista yang ada, tidak seluruhnya siap operasi dan beberapa diantaranya, meskipun masih dapat digunakan, sudah sangat tua usianya. Berikut adalah secara rinci laporan keadaan alutsista di jajaran Kodam I/BB

JENIS	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN	
		B	RR	RB	SIAP OPS	TIDAK SIAP OPS
JAT INF	28.419	20.557	5.845	1.9274	72,4%	27,6%
MERIAM ARM	18	15	3	--	83.4%	16,6%
MERIAM ARH	74	30	33	11	40,5%	59,5%
RUDAL ARH	12	SDH EXPIRED			100%	
RANPUR	83	69	8	6	82%	18%
MUNISI	10.519.428	31,54 % DARI KEBUTUHAN POKOK				
ALHUB	2.931	1.779	386	766	60,6%	39,4%
MATSUS INTEL	611	28,52 % DARI KEBUTUHAN POKOK				
MATZI	1.420	852	477	91	55,8%	36,1%
ALANGAIR	274	140	47	87	51,09%	48,91%

- 5) Terkait dengan pemenuhan minimum essential force sesuai dengan renstra I dan II, di Kodam I/BB akan dibentuk satuan Yon Armed Roket di Duri, Riau dengan alat utama sistem senjata berupa Astros generasi II/122mm sebanyak 18 pucuk. Juga telah dibentuk satuan komando wilayah baru setingkat Kodim dengan lokasi di Siak dan Rokan Hilir. Dalam hal ini, pihak Pemda Siak menyanggupi untuk menganggarkan pembangunan sebagai bagian dalam APBD Siak tahun 2010 dan menyiapakan lahan seluas 10 ha di Desa Dayun, Kecamatan Dayun

untuk pembangunan Kodim Siak. Untuk Kodim di Rokan Hilir, pembentukannya oleh pemda dimulai pada program kerja tahun anggaran 2010 di Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko Rohil senilai 3,2 miliar.

- 6) Untuk komunikasi, Kodam I/BB didukung oleh tiga perangkat alat komunikasi yaitu Radio HF/SSB, Telepon PT. Telkom dan HT SIMULCAST. Permasalahan dalam sistem komunikasi ini adalah belum adanya alat komunikasi untuk Babinsa sehingga menyulitkan koordinasi langsung dari Satkowil Kodam ke Babinsa. Alat komunikasi yang ada hanya digunakan sampai pada tingkat koramil. Komunikasi babinsa saat ini hanya mengandalkan telpon seluler.
- 7) Dalam kunjungan ini, Panglima Kodam I/BB secara khusus menjelaskan kepada tim Kunker Komisi I DPR RI terkait letak geografis kepulauan Natuna yang menjadi bagian wilayah tanggungjawab Kodam I/BB. Letak Pulau Natuna secara geografis lebih dekat dengan Pulau Kalimantan yang menjadi bagian dari wilayah tugas dan tanggungjawab Kodam XII. Biaya dan jarak tempuh yang harus dilakukan dari Sumatera ke Pulau Natuna jauh lebih mahal dan lebih jauh. Terkait hal tersebut, Panglima Kodam I/BB memohon pertimbangan agar tugas dan tanggungjawab atas Pulau Natuna tersebut dialihkan dari Kodam I/BB ke Kodam XII

b. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut – I

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut – I atau Lantamal I merupakan bagian tidak terpisahkan dari TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga perairan meliputi perairan di tiga propinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Riau dengan luas mencapai 150.000 km². Lantamal I didukung oleh satuan Landasan TNI Angkatan Laut (lanal) yaitu Lanal Sabang, Lanal LSE, Lanal TBA dan Lanal Dumai. Secara umum, kondisi alutsista, kesejahteraan dan dukungan personel Lantamal I masih kurang memenuhi standar *minimum essential force*. Berikut adalah hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Lantamal I:

- 1) Lantamal I Belawan memiliki tugas Pokok antara lain:
 - a) Melaksanakan dukungan logistik dan administrasi unsur operasional TNI AL (kapal, Pesud dan pasukan Marinir).
 - b) Melaksanakan pembinaan potensi nasional dan kekuatan marinir / Binter Matla.
 - c) Melaksanakan pembinaan operasi keamanan laut
 - d) Melaksanakan SAR.
- 2) Dalam menjalankan tugas pokok dan kewajibannya, Lantamal I mengkaji beberapa hal yang dapat menjadi ancaman, terdiri dari ancaman potensial dan ancaman faktual
 - a) Ancaman potensial. Letak Selat Malaka yang berbatasan dengan negara tetangga akan berpotensi menimbulkan konflik bersenjata
 - b) Ancaman faktual berupa konflik kepentingan, tindak pidana dan pelanggaran hukum di laut seperti pelanggaran wilayah oleh negara lain, rompakan, TKI ilegal/imigran gelap, illegal entry fishing dan penyelundupan
- 3) Sarana operasi Lantamal I terdiri dari
 - a) Lantamal I : 3 KRI, 1 Kal, 20 Patkamla

- b) Lanal Sabang : 2 Kal, 6 Patkamla
- c) Lanal LSE : 7 Patkamla
- d) Lanal TBA : 14 Patkamla
- e) Lanal Dumai : 2 Kal, 7 Patkamla

Dari sarana operasi yang ada, yang berjalan hanya 50% - 60%. Demikian juga dari segi kekuatan personel, berdasarkan DSP, Lantamal I Belawan seharusnya didukung oleh 2.363 personel, baik PNS maupun militer. Namun kondisi nyata yang ada, jumlah personel yang dimiliki Lantamal I hanya 1.522 personel atau 64% dari kebutuhan. Sedangkan kendaraan angkut yang dimiliki Lantamal I belawan telah berusia puluhan tahun dengan jumlah 107 kendaraan produk tahun 1984, 1985 dan 1996.

Untuk mendukung tugas pokoknya, Lantamal I didukung oleh kekuatan radar yang digelar di sepuluh tempat atau pos yaitu: Pos Satrad Kreung Geukuh, Pos Satrad Belawan, Pos Satrad Bandar Khalifah, Pos Satrad Bagan Asahan, Pos Satrad Sinaboy, Pos Satrad Muntay, Pos Satrad Sabang, Pos Satrad Sigli, Pos Satrad Idie Rayeuk dan Pos Satrad P. Susu. Kemampuan radar berjalan tersebut tidak maksimal, hanya 60%.

Namun demikian, menurut Dan Lantamal I, dengan segala kekuarangan yang ada, kekuatan yang dimiliki oleh Lantamal I tersebut cukup untuk mengawasi perairan yang menjadi tanggungjawab Lantamal I. Permasalahan utama adalah KRI tersebut berada di bawah perintah gugus lain di Jakarta. Untuk lebih mengoptimalkan tugas dan operasi Lantamal I, Dan Lantamal I memohon adanya dukungan peralatan navigasi dan komunikasi di jajaran patroli keamanan laut.

- 4) Dalam melaksanakan tugas mengamankan perairan Indonesia di wilayah bagian Pulau Sumatera ini, setidaknya sejak tahun 2009 hingga Juli 2010, Lantamal I telah berhasil menyelamatkan kekayaan negara sejumlah Rp. 806.518.631.600,- dengan rincian tahun 2009 pemeriksaan terhadap 336 kapal (25 diproses) dan pada tahun 2010 (hingga Juli) pemeriksaan terhadap 56 kapal (9 diproses).
- 5) Terkait perumahan, kondisi perumahan prajurit Lantamal I Belawan banyak yang sudah lapuk dan tidak layak huni. Berikut adalah data mengenai perumahan prajurit TNI di lingkungan Lantamal I

NO	PERUMAHAN / MESSING	JUMLAH (UNIT)	KET
1.	Ikan Barakuda Tj. Mulia	401	TH 96 / 60%
2.	Ikan Hiu Titi Papan	121	TH 69 / 50%
3.	Dewa Ruci Simpang Kantor	50	TH 72 / 65&
4.	Ikan Paus Belawan	48	TH 61 / 45%
5.	Gajah Mada Belawan	18	TH 61 / 50%
6.	Lumba-lumba Belawan	103	TH 72 / 60%

7.	Macan Tutul Belawan	60	TH 72 / 60%
8.	Rumah Jabatan Dan/Wadan	2	TH 50 / 60%
	Jumlah	803	

- 6) Terkait kunjungan ke Lantamal I, Tim Kunker Komisi I DPR RI juga melakukan tinjauan lapangan ke Batalyon Marinir Hanlan I dan perumahan dinas di personel prajurit TNI maupun PNS di lingkungan Lantamal I. Luas lahan perumahan tersebut seluruhnya adalah 23 ha namun tidak seluruhnya terpakai. Terkait dengan tidak layak nya lagi perumahan yang ada serta masih adanya lahan sisa, direncanakan akan dibangun rusunawa 4 lantai untuk 65 KK seluas 8 ha.

c. Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III

Komando pertahanan udara nasional (Kohanudnas) merupakan komando utama terpenting dalam kekuatan TNI Angkatan Udara yang berfungsi sebagai mata dan telinga yang mengawasi berbagai pergerakan pesawat udara yang melintasi wilayah udara Indonesia dimana Kosek III merupakan salah satu satuan yang berada dalam struktur organisasi Kohanudnas. Wilayah udara nasional yang menjadi tanggungjawab Kosekhanudnas III meliputi 3 Kodam, dari Sabang hingga pertengahan Jambi. Kondisi alutsista dan kesejahteraan jajaran Kosek Hanudnas III secara umum juga belum memenuhi standar *minimum essential force*. Berikut adalah laporan tim Kunker Komisi I DPR RI tentang Kosek Hanudnas III

- 1) Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III atau Pangkosekhanudnas III merupakan satuan pertahanan udara nasional yang berada dibawah komando Panglima Kohanudnas yang bertugas menyelenggarakan dan mengendalikan operasi pertahanan udara di wilayahnya sesuai tanggung jawab wilayah geografis untuk mendukung tugas pokok kohanudnas.
- 2) Fungsi Kosekhanudnas III adalah
 - a. Menyusun dan mengembangkan sistem pertahanan udara di wilayah Kosek III
 - b. Memelihara dan meingkatkan kesiapan operasi unsur-unsur hanudnas
 - c. Memonitor kesiapan kekuatan pertahanan udara di wilayah Kosek III
 - d. Melakukan pengawasan dan pengamanan kedaulatan di wilayah Kosek III
 - e. Mengamati, mencari menemukan, pengenalan, penyergapan dan penghancuran sasaran udara
 - f. Melakukan koordinasi potensi pertahanan udara dan pengendalian kegiatan pertahanan udara pasif
 - g. Pembinaan perronel dan pembinaan materi pertahanan udara
- 3) Kosek Hanudnas III bertanggungjawab terhadap 8 obyek vital yan gberada dalam wilayahnya, yaitu; PT. Inalum Asahan, PT. LNG Arun Lhokseumawe, Pt. Caltex Dumai, Bandara SIM Banda Aceh, Bandara Polonia Medan, Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, dan Bandara Minang Kabau Padang

- 4) Kekuatan dan satuan jajaran Kosekhanudnas III terdiri POSEK III, Satrad 231 LSE, Satrad 232 DMI, Satrad 233 SAB, Satrad 234 SBG, Ts F-16, F-5, Hawk-109/209, Den Rudal -001 / IM, Den Rudal -004 / I BB, Yon Arhanudse 11/ I BB, Yon Arhanudse 13/ I BB dan KRI Puan Hanud. Satuan-satuan tersebut sebagian sifatnya adalah BKO. Selain itu, kondisi alutsista di satuan-satuan tersebut sudah expired dan berusia tua. Usia yang sudah tua menyebabkan jarak tangkap radar menjadi semakin pendek. Kemampuan dan kualitas radar militer milik Kosek Hanudnas III dibawah radar sipil. Kekuatan radar sipil yang turut memperkuat radar Kosekhanudnas III adalah: MCC Polonia, MCC Pekanbaru, dan MCC Banda Aceh
- 5) Kegiatan operasi Kosek Hanudnas III meliputi:
 - a) Operasi Pertahanan Udara. Untuk mendeteksi dini setiap bentuk ancaman udara secara terus menerus. Titik berat pada radar2 hanud
 - b) Operasi Pertahanan Udara Pasif. Operasi dilaksanakan tidak langsung dalam menghadapi ancaman serangan udara meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya serangan udara.
 - c) Operasi Pertahanan Udara terkoordinasi. Operasi dilaksanakan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia (Selat Malaka) oleh Kosekhanudnas III Medan dan dan soc butterworth.
 - d) Operasi Pertahanan Udara Cover. Melakukan radar cover bagi penerbangan VIP/VVIP dan lain lain
- 6) Latihan Kosekhanudnas III meliputi:
 - a) Latihan Profisienasi, yaitu melakukan pembinaan kesiapan operasi
 - b) Latihan Operasi Hanud "Cakra C", mencakup radar dan pesawat tempur sergap
 - c) Latihan Operasi Hanud "Perkasa C" yang melibatkan semua unsur
- 7) Hambatan dan kendala yang dimiliki oleh Kosekhanudnas III adalah sebagai berikut:
 - a) Sarana komunikasi masih sering terganggu karenakurang kuatnya TX radio comm disamping kondisi cuaca sehingga komunikasi operasi dan latihan belum maksimal. Hampir dalam setiap latihan gabungan yang digelar oleh hanudnas selalu ada *jammings* beberapa menit yang mengganggu komunikasi.
 - b) Radar sudah dimakan usia
 - c) Belum memiliki rudal dan meriam hanud
 - d) Belum memiliki peralatan elektronika yang modern.
 - e) Belum memiliki busur yang ditempat di Banda Aceh, Medan. Saat ini, semuanya ditempatkan di Pekanbaru

Selain itu, kondisi gedung pusat operasi Kosekhanudnas perlu perbaikan terkait dengan kebocoran yang pernah dialami saat tsunami tahun 2004.

- 8) Saran yang disampaikan oleh Kosekhanudnas III kepada Komisi I DPR RI terkait pemenuhan alutsista yang diharapkan dapat memperkuat Kosekhanudnas III adalah antara lain adalah sebagai berikut:
 - a) BKO 1 flight pesawat TS (4 pesawat) supersonik yang bisa segera digeser ke Banda Aceh, Medan dan Pekanbaru.

- b) Diperlukan pesawat jammer F-111 yang bisa terbang rendah dan melakukan jam terhadap komunikasi pihak lain.
- c) 1 skadron rudal jarak sedang mobile yang bisa digerakkan kemana saja.
- d) Rudal/meriam penangkis serangan udara di satrad/lanud.

d. Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan

Keberadaan, Tugas dan Fungsi Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan baik itu sebagai Satuan Pelaksanaan Pembinaan maupun sebagai Satuan Pelaksanaan Operasi di jajaran Koopsau I tetap memegang peranan penting sampai saat ini. ketika di penghujung tahun 2004 terjadi Bencana Alam Gempa Tektonik dan Badai Tsunami, Lanud Medan dijadikan Pusat Penanggulangan Bencana Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara sehingga seluruh Dunia Penerbangan lebih mengenal Lanud Medan di banding Bandara atau Lanud lain. Dengan tercatat sebagai Lanud Tersibuk Di Dunia 298 flight setiap hari dalam dan luar negeri pada Penanggulangan Bencana Alam tersebut. Sesuai Keputusan Wapres, Gubsu sebagai Kasatkorlak dan Komandan Lanud Medan Kolonel Pnb Sudipo Handoyo sebagai Ka Satgasops yang membawahi Satgas Udara, Satgas Darat dan Satgas Laut dalam penyaluran bantuan evakuasi dan kegiatan-kegiatan angkutan lainnya.

Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan atau Lanud Medan merupakan jajaran satuan Koopsau I yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan operasi satuan dalam jajarannya, pembinaan potensi kedirgantaraan serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya baik OMP maupun OMSP dimana wilayah tanggungjawabnya meliputi seluruh Propinsi Sumatera Utara dan Sibolga (Bandara Pinangsori). Dalam kunjungan ini, Komandan Lanud Medan memaparkan permasalahan utamanya yaitu konflik kepemilikan lahan dengan masyarakat serta kondisi pangkalan yang tidak lagi kondusif bagi pangkalan militer.

Lanud Medan menempati lahan seluas 591,3 ha berdasarkan riwayat sebagai berikut:

1. KSAP No:023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950
2. Surat Menhan No: MP/A/705/57 tanggal 3 Agustus 1957
3. Kep Bersama Komandan Militer Kota Besar Medan dengan Komandan Pangkalan TNI AU Medan No:01/1958 tanggal 3 Feb 1958

Berdasarkan dasar tersebut maka ditentukan batas-batas Pangkalan TNI AU Medan yaitu :

- Sebelah Timur dengan Sungai Deli
- Sebelah Barat dengan Sungai Babura
- Sebelah Utara dengan Jalan Merdeka dan Jalan Mongonsidi
- Sebelah Selatan dengan Gedung Johor/Rel Kereta Api

Pada tanggal 26 Februari 1993 Kepala Kantor Pertanahan Kodya Menerbitkan SKPT Nomor : 630.2.2518/PKM/1993 yang menyatakan Luas Tanah TNI AU Lanud Medan adalah 591,3 Ha sesuai Peta Situasi Nomor : 12/1991

Namun dalam kenyataannya saat ini, lahan lanud Medan juga ditempati oleh ribuan warga selama puluhan tahun yang juga merasa memiliki lahan tersebut sebagai grant dari Sultan Deli. Akibatnya, Lanud Medan terlibat konflik kepemilikan

dengan masyarakat. Dilihat dari faktor keselamatan, lanud Medan sudah tidak aman karena lingkungan di sekelilingnya tidak steril dan menjadi wilayah permukiman penduduk. Meskipun Lanud Medan memiliki dana untuk melakukan sertifikasi lahan, biaya sosial yang ditimbulkan akan sangat tinggi. Ruislag antara Pemda dan TNI akan menjadi solusi terbaik. Lahan Lanud yang saat ini ditempati sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan diproses sertifikasinya sementara TNI diberikan tempat baru ke tempat lain seperti di Langkat.

Dalam kesempatan ini juga, Komisi I DPR RI mempertanyakan penyelesaian sengketa rumah dinas yang melibatkan Lanud Medan dengan para purnawirawan. Terkait dengan informasi penggusuran rumah dinas para purnawirawan, veteran maupun putra putri, Lanud Medan memandangnya sebagai sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan dan didramatisir oleh media. Namun demikian, Lanud Medan berhadap agar Komisi I DPR RI dapat menuntaskan kasus ini secara bijak dan *win-win solution*, khususnya terhadap rumdis dan konflik lahan yang melibatkan Lanud Medan.

Terkait dengan persoalan rumdis dan lahan ini, Komisi I DPR RI minta agar Danlanud mengirimkan data lengkap dan resmi kepada Komisi I DPR RI yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan dan kajian bagi Panja Rumdis dan Tanah TNI.

Terkait dengan rencana pembangunan Bandara Kuala Namo Lanud Medan menanggapi positif dan memberikan dukungannya. Namun sebaiknya bandara tersebut tidak digabung dengan Lanud Medan karena akan mengganggu aktifitas ekonomi bandara dimana penerbangan Medan merupakan salah satu penerbangan sibuk di Indonesia.

2. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Terkait dengan bidang tugas komunikasi dan informasi, Komisi I DPR RI menerima laporan dan masukan dari bidang terkait yang terdiri dari 11 unsur. Berikut adalah hasil dari kunjungan tersebut:

a. Dinas Kominfo Pemprop. Sumatera Utara

Secara keseluruhan, apa yang disampaikan oleh Dinas Kominfo Pemprop Sumatera Utara memiliki kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara dimana terkait dengan sektor Komunikasi, telekomunikasi dan informatika, Propinsi Sumatera Utara merupakan propinsi yang mampu memberikan pemasukan kepada negara yang sangat besar yaitu sekitar 10 triliun sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya dari pemberian hak penyelenggaraan frekuensi konsesi dan pemberian izin hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Sekitar 50% wilayah Propinsi Sumatera Utara, khususnya di wilayah pedesaan dan pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara-negara lain belum tersentuh oleh jaringan telekomunikasi sehingga menyulitkan komunikasi dan monitor terhadap dinamika yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Selain belum tersentuh oleh jaringan komunikasi, banyak wilayah-wilayah perbatasan dan pedesaan belum dapat mengakses jaringan TVRI karena banyaknya *blank spot*. *Blank spot* ini terjadi karena topografi wilayah Sumatera Utara yang berbukit-bukit, banyak hutan serta pulau-pulau jauh kecil. Selain bentuk topografi yang

mengakibatkan *blank spot*, beberapa jaringan TVRI yang ada di Sumatera Utara juga tidak dapat berfungsi secara maksimal karena kekuatan pemancarnya semakin rendah akibat usia pemancar yang semakin tua. Akibatnya adalah acara-acara lokal yang dimaksudkan sebagai informasi bagi terjadinya dinamika positif dan pembangunan yang terjadi di Sumatera Utara tidak dapat disaksikan dan tersosialisasikan secara baik. Kondisi ini menjadi semakin tidak baik karena semakin berkurangnya konten lokal. Sebaliknya, jaringan televisi dan radio dari negara-negara lain, khususnya di wilayah dekat perbatasan Sumatera Utara bagian Timur, mudah diakses oleh warga. Keadaan ini dapat berdampak pada lunturnya semangat nasionalisme dan kebangsaan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, terdapat banyak aturan yang berbenturan antara peraturan daerah dan aturan-aturan lainnya tentang ijin untuk pembangunan stasiun, menara telekomunikasi dan lain-lain serta disharmoni sistem kerja antara pusat dan daerah.

Terkait dengan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan langkah-langkah pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah Sumatera Utara.

Terkait dengan kondisi dan permasalahan yang ada tersebut, Dinas Kominfo mengharapkan agar:

- 1) Negara memberikan dukungan dan anggaran yang lebih besar kepada Propinsi Sumatera Utara dalam sektor komunikasi, telekomunikasi dan informatika karena propinsi ini telah menyumbang PNPB terhadap negara yang sangat besar dalam sektor ini.
- 2) Memberikan dukungan anggaran yang lebih besar bagi TVRI dan RRI untuk menutupi *blank spot*, menambah dan membangun pemancar baru serta memperbaiki atau mengganti usia pemancar yang sudah tua dan kurang berfungsi dengan baik.
- 3) Agar konten lokal semakin diperbanyak.

b. TVRI, KPID dan Balai Monitor

TVRI Stasiun Sumatera Utara merupakan bagian dari LPP TVRI pusat yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi TVRI pusat yang diaplikasikan secara lokal. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam TVRI Sumut adalah:

- 1) TVRI Sumatera Utara telah memiliki 20 transmisi. Namun dari sejumlah transmisi tersebut, hanya 7 transmisi saja yang dapat menyiarkan siaran TVRI Sumut (konten lokal), selebihnya hanya relay TVRI Pusat Jakarta
- 2) Terdapat 17 daerah *blank spot* yang tidak dapat menerima jaringan TVRI
- 3) Usia peralatan teknik dan sarana serta prasarana baik di studio maupun di pemancar sudah melewati masa pakai
- 4) Sistem penyiaran baik peralatan studio maupun transmisi masih analog
- 5) Tidak tersedia alokasi dana di APBN untuk pengadaan peralatan baru
- 6) Terbatasnya alokasi dana untuk pemeliharaan peralatan teknik, sarana dan prasana
- 7) Usia SDM PNS banyak yang mendekati masa pensiun

- 8) Sistem transportasi dan distribusi signal informasi siaran TVRI Sumut melalui teresterial terbatas tidak bisa bersinergi (*cross line*) dengan TVRI pusat.

Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Sumatera Utara terbentuk pada 4 Desember 2008 untuk melaksanakan fungsi pengaturan penyiaran di Sumatera Utara baik di bidang infra struktur maupun materi penyiaran. Dalam operasionalnya KPID mengalami berbagai kendala, antara lain :

- 1) Secara kelembagaan masih lemah dalam pemetaan dan penataan bisnis dan SDM dalam bidang penyiaran.
- 2) Masa kerja komisioner daerah selama 3 tahun tidak cukup untuk dapat melaksanakan tugas yang telah diprogramkan sehingga perlu diubah atau diperpanjang menjadi 5 tahun
- 3) Belum memiliki format isi siaran, standar pemantauan dan format penanganan aduan publik untuk melakukan monitoring dan evaluasi siaran.
- 4) Belum dapat melaksanakan program kerja karena anggaran APBD 2010 tidak bisa dicairkan akibat adanya perubahan pejabat eselon di tingkat sekretariat KPID Sumut.
- 5) Belum dapat secara optimal memberlakukan sistem stasiun jaringan (SSJ) terhadap 10 televisi nasional yang ada di Sumut dimana materi isi siaran masih didominasi Jakarta (pusat) sementara materi lokal hampir tidak ada, kecuali hanya bersifat pemberitaan.

Balai Monitor Sumatera Utara merupakan lembaga penyedia jasa pemantauan spektrum frekuensi radio dan informasi yang akurat dan memberikan perlindungan kepada pengguna frekuensi yang legal dan semua pihak yang terkait. Spektrum frekuensi radio merupakan aset nasional yang amat vital dan strategis yang bernilai tinggi bagi negara sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadapnya melalui Balai Monitor agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Balai Monitor antara lain untuk melaksanakan pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio, pengukuran/ pengujian, deteksi lokasi sumber pancaran; pelayanan/pengaduan masyarakat; penertiban dan penyidikan; pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi perangkat. Beberapa permasalahan yang dihadapi Balai Monitor Sumatera Utara adalah:

- 1) Belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal terkait dengan keberadaan Balai Monitor yang masih baru
- 2) Beberapa lembaga atau instansi pemerintah banyak yang menggunakan frekuensi radio tidak terdaftar (ilegal) seperti pihak kepolisian maupun TNI. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan dimana pihak-pihak lain akan turut mendirikan siaran tanpa perlu ijin dengan alasan demi kepentingan umum

c. PT. Telkom dan PT. Pos Indonesia

PT. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh negara dan publik. Total saham yang dimiliki PT Telkom adalah 20,159,999,280 lembar saham. 52.47% dari total saham dimiliki oleh negara dan sisanya oleh publik. Kontribusi Telkom kepada pemerintah pertahunnya sangat besar. Saat ini Telkom tidak hanya bergerak dalam bidang telekomunikasi saja (Fixed Wireline, Fixed Wireless, Cellular, Broadband Access, Satellite), tetapi juga merambah pada sektor Informasi (IT services), media (TV berbayar) dan edutainment (portal, e-commerce, content). Terkait dengan banyaknya pulau terluar

di wilayah Sumatera Utara, PT Telkom telah membangun jaringan komunikasi (telepon, fax dan internet) di empat pulau terluar terpenting, yaitu di Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung dan Pulau Rondo. Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dan hambatan PT. Telkom adalah;

- 1) Masih tingginya perilaku vandalisme di kalangan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi lainnya seperti kerusakan terhadap fasilitas telepon umum dan pencurian kabel
- 2) Belum adanya roadmap industri telekomunikasi yang lengkap yang dapat dijadikan panduan bagi PT Telkom dalam mengembangkan bisnis dan perusahaannya
- 3) Belum ada mekanisme reward & recognition kepada operator yang menjalankan bisnis dan perusahaannya dengan baik dan profesional
- 4) Perijinan terhadap galian dan pendirian tower yang sulit, dan

PT. Pos Indonesia wilayah Sumatera Utara merupakan bagian dari PT. Pos Indonesia yang termasuk dalam Divisi Regional I (Divre I) meliputi Sumatera Utara dan Aceh yang didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 1670 yang tersebar di 298 outlet dan kantor pusat Divre I dengan usaha yang mencapai 9 bisnis. Beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Divre I adalah:

- 1) Luas jangkauan wilayah layanan Sumatera Utara adalah 71.680,68 km² dengan sebaran yang tidak merata, banyak terdapat pulau-pulau kecil terluar dan letaknya terpencil di pedalaman serta terisolasi dan infrastruktur terbatas, sering padam listrik, rawan bencana, menyulitkan operasional dan biaya tinggi sehingga layanan menjadi terhambat.
- 2) Jangkauan layanan per titik lebih dari 3.000 km²
- 3) Pendapatan kantor pos cabang di daerah tertentu tidak cukup menutupi biaya operasional
- 4) Keberadaan layanan pos kurang dimanfaatkan optimal oleh pemda sebagai akses pelayanan publik
- 5) Dengan diberlakukannya UU No 38 tahun 2009 tentang Pos, persaingan layanan jasa di bidang pos semakin kompetitif dan persaingan di daerah gemuk sangat ketat.
- 6) Kemajuan teknologi yang ada disatu sisi memberikan kemudahan interaksi dan komunikasi masyarakat semakin cepat, tetapi di sisi lain mengurangi peran-peran yang dahulu dilakukan oleh PT. Pos.
- 7) Perbandingan kemajuan teknologi PT. Pos dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang layanan sejenis kurang kompetitif sehingga memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
- 8) Tarif dasar layanan jasa PT.Pos masih sangat rendah

d. Operator Telekomunikasi Seluler (Telkomsel, Indosat dan XL Axiata)

Telkomsel, Indosat dan XL Axiata merupakan tiga besar perusahaan yang bergerak dibidang jasa telekomunikasi di Sumatera Utara. Berikut adalah beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi:

- 1) Pemborosan bagi perusahaan jaringan telekomunikasi yang membangun jaringan optik sendiri-sendiri. Pemborosan tersebut dapat dihilangkan apabila ada sinergi dan koordinasi antar perusahaan
- 2) Pemekaran wilayah yang terjadi melahirkan konflik antara perusahaan dengan wilayah baru dimana wilayah baru tersebut mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memiliki ijin pembangunan fasilitas telekomunikasi yang ada di

wilayahnya, seperti tower atau menara BTS, padahal ijin tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya yang kini tidak lagi memiliki wewenang administrasi atas fasilitas telekomunikasi tersebut.

- 3) Adanya klaim atau keberatan warga atas keberadaan tower.
- 4) Vandalisme berupa pencurian dan perusakan terhadap tower dan fasilitas telekomunikasi lainnya.
- 5) Terganggunya jaringan komunikasi akibat adanya gangguan terhadap kabel bawah tanah akibat penggalian seperti pelebaran jalan, pembangunan maupun pencurian.
- 6) Tingginya biaya IMB hingga proses pengurusan rekomendasi surat pendirian BTS, dan perizinan yang memakan waktu lama dan berliku-liku.
- 7) Adanya Implementasi UU No.28 terkait retribusi yang sering berbeda di setiap daerah terutama tentang retribusi HO dan SITU
- 8) Keterbatasan infrastruktur dan krisis daya PLN. Akses jalan dan krisis daya listrik terutama di daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan telekomunikasi dalam mengembangkan site-site baru maupun eksisting.
- 9) Tingginya harga sewa lahan yang sudah melebihi nilai ekonomis, NJOP dan nilai pasar.

C. LAIN – LAIN

Selain pertemuan yang telah diagendakan dengan beberapa mitra kerja Komisi I DPR RI tersebut di atas, Komisi I DPR RI juga menerima kunjungan dari para purnawirawan, veteran dan putra-putri keluarga TNI yang tergabung dalam forum-forum dan badan musyawarah asrama di Medan dan sekitarnya terdiri dari:

- Asrama Marinda, Biduri
- Asrama Kodim 032 Langkat, Binjai
- Asrama Kodam
- Asrama Eks Kowilhan
- Asrama AURI Medan Medan
- Asrama Singgasana 3 Glugur, Medan
- Asrama Martoba, Siantar
- Asrama Mahoni
- Asrama Abd. Hamid

Topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah konflik antara keluarga besar purnawirawan dengan TNI terkait lahan atau rumah dinas yang ditempati. Beberapa hal yang disampaikan pada intinya adalah:

- 1) Mendapat ultimatum pengosongan rumah dinas dalam waktu tertentu atau diusir secara paksa dengan imbalan atau ganti tugi yang jumlahnya berbeda-beda
- 2) Rumah dinas yang ditempati pada awalnya merupakan rumah tidak layak huni, tidak terawat dan terabaikan. Rumah-rumah tersebut pada awalnya banyak yang merupakan gudang-gudang peninggalan Belanda yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.
- 3) Para penghuni kemudian memperbaiki rumah tersebut secara bertahap sehingga menjadi lebih baik dan layak huni.
- 4) Fasilitas-fasilitas perumahan lain seperti penerangan, jalan, kebutuhan air maupun telekomunikasi diupayakan secara swadaya.
- 5) Penghuni secara rutin membayar sendiri PBB tanpa ada bantuan dari pemerintah.
- 6) Sebagian tanah yang ditempati merupakan grat dari Sultan Deli.

- 7) Sebagian dari penghuni adalah keluarga veteran dan pejuang kemerdekaan yang tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal
- 8) Beberapa lahan milik TNI telah beralih fungsi menjadi lahan komersil seperti perumahan mewah atau kawasan niaga lainnya.
- 9) Karena dinilai telah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan yang ada, minta agar golongan rumah dinas yang mereka tempati berubah status menjadi golongan III sehingga dapat dibeli dan dimiliki.
- 10) Beberapa diantara penghuni asrama telah menunjuk pengacara dan mengajukan kasusnya ke pengadilan, namun hingga kini masih belum ada keputusan.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI memberikan masukan sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI bersimpati terhadap keluarga purnawirawan dan veteran yang telah berjasa dalam menjalankan tugas untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Karenanya, Komisi I DPR RI bertekad akan mencari solusi terbaik, *win win solution*, bagi semua pihak, baik purnawirawan/veteran maupun pihak TNI. Ketentuan ini tidak berlaku bagi keluarga yang memiliki tempat tinggal lebih dari satu, mengontrakkan rumdis kepada pihak lain atau melakukan *over VB*.
- 2) Komisi I DPR RI telah membuat MoU dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI terkait moratorium pengosongan rumah dinas hingga ada keputusan lebih lanjut. Keputusan moratorium tersebut telah menjadi keputusan DPR RI yang disampaikan oleh Ketua DPR RI dalam pidato memasuki masa persidangan II.
- 3) Komisi I berharap agar mekanisme musyawarah dan mediasi damai di luar pengadilan diprioritaskan terkait dengan upaya-upaya yang tengah dilakukan oleh Komisi I, cq. Panja Tanah dan Rumdis TNI, dalam mencari solusi terbaik.
- 4) Menyarankan agar berkomunikasi secara intens kepada wakil-wakil rakyat dari wilayah atau dapilnya untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

BAB III

SARAN, REKOMENDASI DAN PENUTUP

I. SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Sumatera Utara, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

A. PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI DAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

1. Dalam menyusun RUTR, Pemda Propinsi hendaknya melibatkan dan berkoordinasi dengan melibatkan TNI karena selama ini banyak RUTR Pemda yang tidak sejalan dengan kepentingan TNI dalam mengelola lahannya. Akibatnya, lahan-lahan TNI yang seharusnya steril dari permukiman dan warga justru menjadi pusat keramaian kota.
2. Bekerjasama dengan berbagai lembaga yang memiliki unsur intelijen, khususnya Poswil BIN Sumut untuk mengaktifkan dan memberdayakan Kominda secara optimal.
3. Terkait dengan banyaknya pulau-pulau terluar di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain, Komisi I DPR RI akan memberikan perhatian terhadapnya, khususnya dukungan bagi peningkatan anggaran untuk menjaga keamanan dan kedaulatan pulau-pulau tersebut serta pemenuhan fasilitas sarana dan prasana komunikasi dan informasi lainnya

B. BIDANG PERTAHANAN

1. Bidang pertahanan di wilayah Sumatera Utara baik dari satuan TNI AD, TNI AU maupun TNI AL belum seluruhnya mencerminkan minimum essential force sehingga perlu ditingkatkan anggaran bagi alutsista sesuai kebutuhan dan permintaan TNI di lapangan agar kedaulatan NKRI dapat terlindungi dan dihormati oleh seluruh masyarakat internasional, baik masyarakat sipil (para pelaku kriminal) maupun masyarakat militer (yang bertujuan mengganggu, melanggar dan menghancurkan kedaulatan NKRI).
2. Tingkat kesejahteraan prajurit TNI maupun personel PNS di satuan-satuan TNI serta perumahan yang ada sangat memprihatinkan. Pendapatan atau gaji yang diterima hanya cukup untuk 2 minggu. Remunerasi yang dijanjikan oleh Pemerintah agar secepatnya direalisasikan. Informasi mengenai akan adanya peningkatan kesejahteraan melalui remunerasi oleh Pemerintah melahirkan beberapa permasalahan. Janji tersebut di satu sisi memberikan harapan tinggi sehingga beberapa personel TNI melakukan pembelian barang maupun perumahan atau pinjaman uang dengan harapan akan dapat dibayar saat remunerasi tiba, tetapi di sisi lain (karena tidak kunjung datang) melahirkan rasa frustrasi dan kecewa, terutama bagi personel yang telah melakukan akad jual-beli atau pinjaman. Rasa frustrasi dan

kekecewaan tersebut dapat mengarah pada tindakan kriminalitas karena desakan kebutuhan ekonomi.

3. Sebagian rumah dinas yang ada tidak lagi layak untuk ditempati dan perlu segera untuk dibangun rusunawa atau rusunami. Rumah dinas yang kini ditempati direnovasi dengan dana swadaya dan tanpa ada bantuan dari pusat.
4. Tugas militer bukanlah semata operasi militer perang (OMP) tetapi juga operasi militer selain perang (OMSP) atas permintaan bantuan dan dikoordinasikan oleh pemda setempat. Terkait dengan bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Utara dimana unsur TNI terlibat di dalamnya, tidak pernah ada bantuan dari BNPB terhadap TNI. Dana yang diperoleh dan disalurkan oleh atau melalui TNI yang mencapai miliaran rupiah bukan berasal dari pemerintah melainkan dari sumbangan sukarela masyarakat dan prajurit TNI.
5. Banyak teknologi alat komunikasi yang tidak dapat berfungsi secara optimal dan *connect* karena tidak compatible satu sama lain, seperti alat komunikasi yang tidak match karena perbedaan sistem dan merek. Dalam konteks ini TNI mengharapkan agar dalam pembelian alutsista semua elemen terkait dan berkepentingan dilibatkan sehingga setiap satuan dan angkatan dapat saling mendukung operasi yang sudah dijalankan.
6. Terkait dengan keberadaan Kodam I/BB yang berada di wilayah strategis dan berbatasan langsung dengan banyak negara, Kodam I/BB kurang didukung oleh alutsista dan personel yang kuat. Wilayah yang menjadi tanggungjawab Kodam I/BB sangat luas, sementara dukungan kualitas dan kuantitas alutsista dan prajurit kurang memadai. Sehingga apabila terjadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI melalui wilayah yang menjadi tanggungjawab Kodam I/BB, Kodam I/BB tidak mampu memberikan perlawanan secara maksimal
7. Berdasarkan laporan dari DanLantamal I, kekuatan tempur yang dimiliki oleh Lantamal I yaitu 3 unit KRI sudah cukup untuk menjaga keamanan dan patroli laut yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini kurang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat dimana kondisi alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI di satuan Koarmabar belum mencukupi kebutuhan sehingga perlu ditingkatkan. Laporan Panglima Koarmabar ini sesuai dengan informasi yang disampaikan Gubernur Sumut dimana kapal-kapal asing pencuri ikan memiliki kecepatan dan teknologi yang lebih baik daripada kapal TNI AL, juga berita dari DPRD Komisi A DPRD Sumut yang prihatin terhadap kekuatan personel maupun sarana dan prasarana serta logistik operasional.
8. Kapal-kapal asing yang sudah tertangkap oleh patroli keamanan laut Lantamal I apabila tidak dimanfaatkan dengan baik akan cepat rusak dan tenggelam. Karenanya, Lantamal I dapat memanfaatkan kapal-kapal tersebut untuk kepentingan Lantamal I melalui mekanisme penyampaian permohonan izin pakai kepada pihak kejaksaan untuk dapat digunakan dengan memberikan jaminan.

9. Memberikan apresiasi dan akan mengkaji lebih dalam bagi kemungkinan pemindahan Lanud Medan ke lahan lain melalui mekanisme ruislag terkait adanya konflik lahan Lanud saat ini dengan warga setempat.

C. BIDANG KOMINFO

1. Sumbangan propinsi Sumatera Utara terhadap negara dalam sektor jasa telekomunikasi dan informatika sangat besar sehingga perlu ditambah dukungan anggaran dana dari pemerintah pusat terhadap sektor kominfo di Sumut
2. Lembaga penyiaran publik, seperti RRI dan TVRI perlu mendapatkan perhatian lebih di wilayah Sumatera Utara terkait dengan banyaknya pulau dan daerah perbatasan yang belum terjangkau oleh jaringan RRI dan TVRI baik karena usia pemancar yang sudah tua ataupun karena banyaknya *blank spot* agar semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan warga yang berada di daerah perbatasan tidak memudar. Selain persoalan sarana dan prasarana teknis tersebut, perlu peningkatan SDM bagi RRI dan TVRI baik melalui mekanisme pelatihan maupun perekrutan tenaga baru.
3. TVRI Sumatera Utara menempati lahan yang sangat luas namun tidak optimal pemanfaatannya serta sarana yang dimilikinya tidak lengkap. Perlu dipertimbangkan mengenai kemungkinan adanya ruislag dimana lahan luas tersebut dikembalikan kepada negara dan sebagai imbalannya, negara memberikan gedung baru kepada TVRI di atas lahan secukupnya namun dilengkapi oleh sarana, prasarana maupun fasilitas modern sehingga TVRI dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.
4. Telekomunikasi, komunikasi dan informatika merupakan bagian dari infrastruktur lain yang sangat penting untuk dipelihara dan dikontrol keberadaan dan pemanfaatannya. Terkait dengan hal tersebut agar seluruh pihak menggunakan frekuensi dan jaringan yang ada secara maksimal demi kepentingan publik namun melalui mekanisme yang benar, legal dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.
5. Instansi-instansi yang bertugas sebagai pengawas atau memonitor telekomunikasi dan informasi agar bersikap tegas dan berani mengambil tindakan hukum terhadap industri-industri telekomunikasi dan informasi yang dinilai menyalahi atau menyimpang dari aturan yang ada, melakukan penertiban stasiun-stasiun radion maupun pemancar ilegal serta pengaturan frekuensi berdasar aturan yang berlaku.
6. Perlunya peningkatan keamanan bersama baik dari aparat pemerintah maupun perusahaan penyedia jasa telekomunikasi untuk melindungi fasilitas umum dari perilaku vandalisme
7. Propinsi Sumatera Utara memiliki komponis yang peduli terhadap budaya-budaya lokal seperti (alm) Ahmad Baki dimana karya-karyanya kurang dikenal luas oleh bangsa sendiri tetapi justru dikenal oleh bangsa dari negara lain. Terkait dengan hal tersebut, sebagai penghargaan atas karya

bangsa, agar TVRI aktif memperkenalkan dan mempromosikan karya-karya Ahmad Bakir dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi menjadikan karya-karya almarhum sebagai NSP dimana hasil keuntungan yang diperoleh dapat disumbangkan untuk keluarga almarhum atau disumbangkan untuk kegiatan pengembangan budaya lokal.

8. Terkait dengan peran dan fungsi KPID, agar KPID melibatkan DPRD Sumatera Utara untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan KPID (seperti anggaran dan pemenuhan fasilitas lainnya) kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
9. Terkait dengan minimnya fasilitas dan dana komunikasi yang dimiliki oleh bidang-bidang pertahanan (TNI) di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, Komisi I DPR RI berharap agar industri-industri telekomunikasi memberikan kontribusi kepada TNI melalui pemberian sarana, fasilitas atau kebebasan berkomunikasi tanpa dikenakan biaya terhadap sektor-sektor tertentu sebagai bagian dari kepedulian dan tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dan negara seperti yang dilakukan oleh Telkomsel kepada Kodam I/BB dalam hal pengadaan gelar jaring komunikasi *closed user group* Satintel di pulau-pulau terluar tanpa biaya. Sebagai imbal baik, lembaga TNI dapat dilibatkan sebagai instrument yang ikut mengontrol fasilitas telekomunikasi yang ada dari perilaku vandalisme.

II. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 – 2010. Kami harapkan hasil kunjungan kerja tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

KETUA TIM,

H. HAYONO ISMAN, S.IP
A-450